

Kajian Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kawasan Simpang Lima Pati

Muhamat Taufik¹

Diterima : 14 Maret 2012

Disetujui : 13 April 2012

ABSTRACT

Street vendors in Pati Simpang Lima area are invading urban public spaces with increasing number. While providing job opportunities, their unregulated existence reduces the level of service of the public spaces and has starting to create environmental problems. The study examines the street vendors' activity characteristics, space and infrastructure availability, seller and customer preference and the local government's policy on street vendors. The study identified that the availability of open public space in Pati Simpang Lima area have attracted the increase of street vendor activities. There is a growing need for infrastructure such as parking spaces, public toilets and waste related infrastructure. There has not been any local government regulation let alone innovative approaches to street vendor activities in either socio-cultural, economic nor normative terms. The direction was to physically regulate the street vendor area in terms of vendor space allocation, business times regulations and infrastructure. The lack of space in the area has imposed a need for relocation for some of the vendors to a new place such as Jalan Penjawi, with adequate supply of infrastructure. In terms of policy, there should be legalization and limitation of the number of street vendors using socio-cultural, economic and normative models.

Keywords: street vendor activity, public space, area infrastructure

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Pati menempati ruang-ruang publik dan jumlahnya semakin bertambah. Walaupun memberikan kesempatan kerja, keberadaannya yang belum tertata mengurangi tingkat layanan ruang-ruang tersebut dan menimbulkan masalah lingkungan. Studi ini mengkaji karakteristik aktivitas PKL, mengkaji ketersediaan ruang dan infrastruktur, preferensi pedagang dan pengunjung, dan kebijakan pemerintah daerah. Studi ini mengidentifikasi bahwa tersedianya ruang-ruang publik di kawasan Simpang Lima Pati tersebut menarik perkembangan aktivitas PKL. Terdapat kebutuhan yang meningkat terkait infrastruktur seperti ruang parkir, toilet umum, dan sarana persampahan. Belum ada peraturan daerah tentang PKL ataupun pendekatan yang bersifat inovatif baik pendekatan budaya, ekonomi, maupun normatif. Arahan yang muncul adalah penataan fisik PKL berupa pengaturan pola penyebaran dan pengaturan waktu aktivitas PKL serta pengadaan infrastruktur. Kurangnya ketersediaan lahan mendorong perlunya langkah pemindahan sebagian PKL ke Jalan Penjawi disertai penyediaan sarana dan infrastruktur. Dalam hal kebijakan, perlu ada legalisasi dan pembatasan jumlah PKL menggunakan model pendekatan sosial budaya, ekonomi, dan normatif.

Kata kunci: aktivitas PKL, ruang publik, infrastruktur kawasan

¹ Inspektorat Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Kontak Penulis: irtopik@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Pati kurang mengakomodir kepentingan para PKL antara lain tidak dimasukkannya sektor informal dalam perencanaan tata ruang kota, tidak adanya peraturan daerah tentang penataan PKL, serta tidak adanya anggaran daerah untuk mendukung aktivitas PKL termasuk untuk program kemitraan dan penataan PKL. Dalam perencanaan tata ruang kota, Pemerintah Kabupaten Pati hanya mengakomodir kepentingan sektor formal termasuk didalamnya perdagangan di sektor formal. Sektor informal termasuk didalamnya para PKL tidak diakomodir kepentingannya sehingga para PKL menggunakan ruang-ruang publik yang dianggap strategis untuk aktivitasnya. Pemerintah Kabupaten Pati belum membuat peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan PKL termasuk didalamnya ruang-ruang publik yang diperbolehkan untuk aktivitas PKL dan besarnya retribusi yang dikenakan untuk para PKL. Apabila terdapat peraturan daerah tentang penataan PKL, para PKL yang menggunakan ruang publik dapat dikenakan retribusi disesuaikan besarnya ruang publik dan infrastruktur kawasan yang digunakan PKL. Ketiadaan peraturan yang melegalkan aktivitas para PKL di ruang publik menyebabkan para PKL kadang-kadang menjadi objek pemerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga para PKL harus mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya apabila ada peraturan daerah yang melegalkan aktivitas PKL. Selain itu dengan kondisi yang ada, para PKL kurang nyaman dalam menjalankan usaha berdagangnya.

Banyaknya PKL yang ada di kawasan Simpang Lima Pati tidak didukung dengan sarana fisik dagangan yang memadai. Beberapa masalah dalam sarana fisik dagangan antara lain beranekaragamnya sarana fisik dagangan PKL, bahan sarana fisik dagangan PKL yang sederhana, serta bentuk, ukuran dan warna sarana fisik dagangan PKL yang tidak seragam. Selain itu, hampir sebagian besar sarana fisik dagangan PKL baik gerobak, warung tenda, maupun dasaran dilengkapi dengan penutup atas/terpal dengan bahan dasar yang tidak seragam dan dipasang dengan asal-asalan. Pemasangan penutup atas/terpal untuk melindungi sarana fisik dagangan terutama berupa dasaran/gelaran dengan menempelkannya pada tiang listrik, pepohonan, ataupun neon box. Begitu juga dengan penempatan sarana fisik dagangan yang tidak tertata dengan rapi mengurangi keindahan kawasan Simpang Lima Pati. Dengan adanya permasalahan sarana fisik dagangan PKL menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang publik kawasan Simpang Lima Pati.

Banyaknya aktivitas yang ada di kawasan Simpang Lima Pati termasuk didalamnya aktivitas PKL kurang didukung oleh infrastruktur kawasan yang memadai. Beberapa infrastruktur kawasan yang kurang diperhatikan antara lain air bersih, drainase, sanitasi, persampahan, moda transportasi massal, penerangan jalan, ruang parkir dan trotoar. Kurangnya infrastruktur kawasan, minimnya kesadaran pengunjung dan pelaku aktivitas kawasan termasuk didalamnya para PKL menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang publik kawasan Simpang Lima Pati. Misalnya, sampah yang dihasilkan oleh aktivitas para pengunjung kawasan dan PKL yang dibuang di sembarang tempat mengurangi kualitas kawasan. Adanya bau busuk yang berasal dari limbah PKL yang dibuang sembarangan menyebabkan kekurangnyamanan para pengguna ruang publik. Adanya suara musik dengan volume yang cukup keras, bunyi dari arena/alat permainan anak-anak yang disewakan cukup mengganggu kenyamanan para pengguna jalan karena menimbulkan kebisingan suara di kawasan Simpang Lima Pati.

Dari kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan pengelolaan aktivitas PKL di ruang publik kawasan Simpang Lima Pati dengan membuat arahan penataan aktivitas PKL sehingga apabila dilakukan penataan PKL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati akan berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

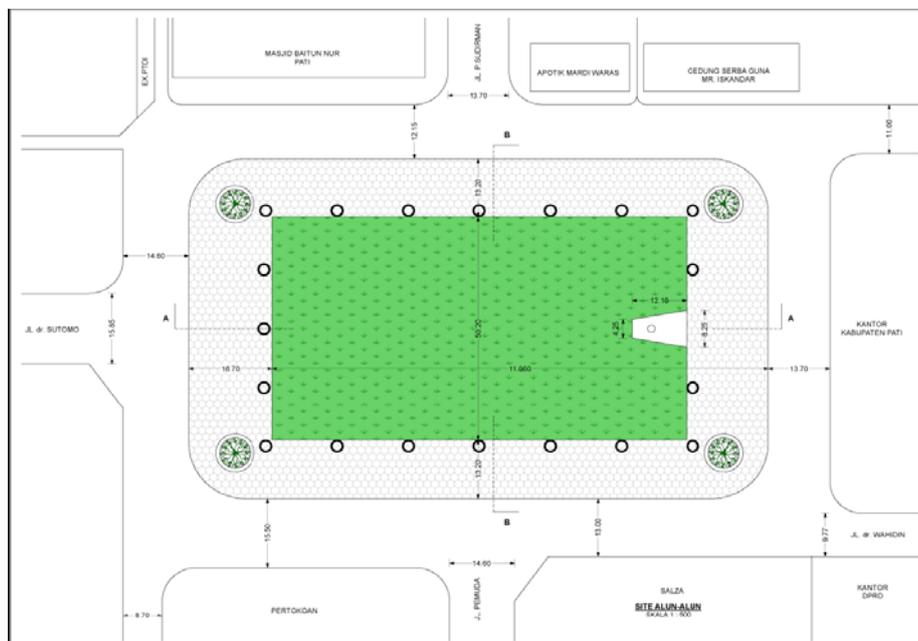
Dalam penelitian digunakan pendekatan penelitian metode campuran (*mix methode research*). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui karakteristik aktivitas PKL di ruang publik kawasan Simpang Lima Pati, ketersediaan ruang aktivitas PKL di kawasan Simpang Lima Pati, kebijakan terkait PKL Simpang Lima Pati, dan ketersediaan infrastruktur kawasan Simpang Lima Pati pendukung aktivitas PKL. Sedangkan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui preferensi PKL serta pengunjung terhadap aktivitas PKL, infrastruktur kawasan pendukung aktivitas PKL dan penataan PKL sehingga dapat dijadikan dasar dalam penataan aktivitas PKL di ruang publik kawasan Simpang Lima Pati.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Lokasi penelitian adalah kawasan Simpang Lima Pati yang terletak di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Aktivitas PKL yang dimaksud adalah yang terletak di kawasan Simpang Lima Pati dengan batas-batas keruangan 5 (lima) koridor jalan yaitu :

- arah Barat : Jalan Panglima Sudirman
- arah Barat Laut : Jalan Tombronegoro
- arah Timur : Jalan Pemuda
- arah Utara : Jalan Dr. Wahidin
- arah Selatan : Jalan Dr. Sutomo

Adapun objek penelitian adalah PKL yang menempati ruang-ruang publik kawasan Simpang Lima Pati baik trotoar, badan jalan, lapangan Pancasila ataupun ruang terbuka lainnya untuk aktivitas berdagangnya. Untuk lebih jelasnya, peta lokasi dan batas-batas keruangannya disajikan dalam Gambar 1.



Sumber : DPU Kabupaten Pati, 2011

GAMBAR 1
KAWASAN SIMPANG LIMA PATI

KAJIAN POLA PENGELOLAAN AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA

Pengelolaan Lokasional

Di dalam penentuan pengelolaan lokasi aktivitas PKL, menurut hasil survei IDRC (1977) maka terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu (Widjajanti, 2000:42-45):

1. Relokasi/pemugaran

Yang dimaksud dengan relokasi adalah pemugaran suatu lokasi untuk dijadikan suatu bentuk fungsional yang baru yang berbeda dari semula ataupun perbaikan kondisi yang telah ada. Kelompok sektor informal yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tersebut, sementara tempat usaha mereka diperbaiki atau dibangun kembali dan apabila telah selesai mereka dapat kembali berusaha di tempat semula. Contohnya, penataan PKL di kawasan Manahan Solo dengan membuat shelter PKL sebagai pengganti warung semi permanen yang digunakan sebagai sarana fisik dagangan PKL.



Sumber: Pemkot Solo, 2011

GAMBAR 2
SHELTER PKL MANAHAN

2. Stabilisasi/pengaturan

Stabilisasi dimaksudkan untuk penataan keberadaan sektor informal pada suatu lokasi. Salah satu dari tindakan tersebut adalah pengaturan kembali sektor informal agar harmonis dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan tempat mereka melakukan usahanya. Tindakan stabilisasi berusaha berada di tengah-tengah antara sektor informal dan problem yang ditimbulkannya. Dasar operasional sektor informal yang harus tetap dipertahankan adalah adanya akses bagi aliran konsumen.

3. Removal/pemindahan

Yang dimaksud *removal* adalah pemindahan sektor informal ke suatu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi lain dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi sektor informal.



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2011

GAMBAR 3
PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SEBAGAI LOKASI RELOKASI PKL BANJARSARI

Pengelolaan Struktural

Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah (Wahyu, 2004):

1. Perijinan
Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menurut jenis barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan sebagai berikut: 1) Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta 2) Membantu dalam penarikan retribusi. Pemberian surat ijin lokasi ini sudah diterapkan di Malaysia, Singapura, Philipina, dan Indonesia (McGee & Yeung, 1977:56-57).
2. Pembinaan
Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehingga menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia, pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat pendidikan PKL. Dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi peningkatan jumlah PKL seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik (McGee & Yeung, 1977:58).
3. Bantuan/Pinjaman
Di Malaysia, pemberian bantuan untuk pinjaman dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti LSM dan lainnya (McGee & Yeung, 1977:59-60).

ANALISIS AKTIVITAS PKL DI RUANG PUBLIK KAWASAN SIMPANG LIMA PATI

A. Aktivitas PKL

- Aktivitas pada sore dan malam hari menghidupkan kawasan Simpang Lima Pati.
- Aktivitas yang menggunakan ruang-ruang publik mengganggu sirkulasi pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor.
- Para PKL tidak menginginkan adanya penataan PKL di kawasan Simpang Lima Pati.

Lokasi dan Tempat Aktivitas PKL

- PKL banyak yang berjualan di kawasan Simpang Lima Pati karena lokasinya strategis.
- Ruang aktivitas PKL menggunakan sistem 'kapling' masing-masing di ruang publik.
- PKL di badan jalan dan trotoar mengganggu pergerakan pengendara dan pejalan kaki.

Jenis Dagangan PKL

- Jenis dagangan yang dijual antara lain makanan, minuman, non makanan dan jasa.
- Beragamnya jenis dagangan PKL disebabkan kawasan Simpang Lima Pati mudah dalam aksesibilitas dan beranekaragamnya aktivitas yang ada.

Sarana Fisik Dagangan PKL

- Sarana fisik dagangan sangat beragam disesuaikan dengan jenis dagangan PKL.
- Bahan, warna, jenis, dan tata letak sarana fisik dagangan yang tidak teratur.

Ruang Aktivitas PKL

- Ruang aktivitas beragam disesuaikan dengan jenis dan jumlah dagangan.
- Tidak adanya standar luasan ruang aktivitas PKL yang ditetapkan pemerintah.
- Ketersediaan ruang lokasi saat ini tidak mencukupi.

Pola Penyebaran PKL

- PKL berdagang mengelilingi ruang terbuka di kawasan Simpang Lima Pati.
- PKL berbagai jenis bercampur untuk mengurangi menyeimbangkan persaingan usaha.

Pola Pelayanan PKL

Hampir semua PKL sudah mempunyai kapling dan pelanggan tetap.

Waktu Berdagang PKL

- Mulai pukul 16.00 s.d. 4.00 WIB.
- PKL yang tidak bukan anggota paguyuban tidak mematuhi waktu berdagang.

B. Ketersediaan Infrastruktur Kawasan

- Infrastruktur yang ada kurang mendukung karena kurangnya anggaran
- Para PKL menyiasati keterbatasan infrastruktur secara masing-masing.

Transportasi

- Jalan berada dalam kondisi baik namun terganggu aktivitas PKL.
- Pergerakan pengunjung menggunakan moda pribadi, tidak ada angkutan umum.
- Moda transportasi yang paling banyak digunakan di kawasan adalah sepeda motor.

Trotoar

- Aktivitas PKL di trotoar secara mengganggu pergerakan pejalan kaki.
- Trotoar tidak memperhatikan kepentingan kaum *diffable*.

Ruang Parkir

Ruang parkir belum sesuai kebutuhan para pengunjung serta PKL.

Air Bersih

Kebutuhan air bersih dipenuhi sendiri dengan cara masing-masing.

Penerangan/Listrik

Penerangan diselenggarakan sendiri dengan cara masing-masing.

Drainase

Saluran drainase di kawasan belum mencukupi kebutuhan.

Persampahan

Tempat sampah di kawasan belum fungsional.

Sanitasi

- Toilet yang ada belum memenuhi kebutuhan pengunjung.
- Tidak ada tempat penampungan air limbah.

C. Kebijakan Penataan PKL**Kebijakan Struktural**

- Belum ada peraturan tentang penataan PKL.
- Pembinaan terhadap PKL oleh Tim Pembina PKL kurang optimal
- Paguyuban kurang optimal karena pengurus sibuk berdagang dan mutu SDM rendah.
- Tidak adanya pemberdayaan maupun pembinaan oleh pemerintah.

Kebijakan Lokasional

Telah dilakukan penataan waktu berdagang PKL, namun pelaksanaannya belum optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis di atas adalah:

1. Tersedianya ruang-ruang publik di Simpang Lima Pati dengan didukung berbagai macam aktivitas baik formal maupun informal menyebabkan muncul dan berkembangnya aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
2. Aktivitas PKL di kawasan Simpang Lima Pati menempati sebagian badan jalan atau trotoar sebagai tempat kepemilikan khusus bagi para PKL dengan melakukan pengaplingan yang tidak bisa diintervensi oleh PKL lainnya meskipun tempat berjualannya merupakan ruang publik.
3. Aktivitas PKL di Simpang Lima Pati selain berdampak positif dapat menghidupkan kawasan mulai sore sampai dengan malam hari, juga berdampak negatif dengan terganggunya aktivitas lain di kawasan saat aktivitas PKL berlangsung karena penggunaan ruang-ruang terbuka yang ada seperti trotoar dalam, badan jalan, trotoar luar, dan lapangan rumput.
4. Jenis dagangan yang dijual PKL Simpang Lima Pati berupa makanan, minuman, non makanan, dan jasa. Beragamnya jenis dagangan PKL disebabkan kawasan Simpang Lima Pati mudah dalam aksesibilitas dan beranekaragamnya aktivitas yang ada di kawasan baik aktivitas formal maupun informal. Bahan, warna, jenis, dan tata letak sarana fisik dagangan serta luasan aktivitas PKL yang tidak seragam dan pemasangannya yang asal-asalan dapat mengurangi keindahan kawasan Simpang Lima Pati.
5. Ketersediaan infrastruktur di kawasan Simpang Lima Pati masih minim dan belum mampu mendukung aktivitas kawasan, termasuk aktivitas PKL terutama tempat sampah, toilet umum, penerangan, ruang parker, dan sanitasi. Ketersediaan ruang di kawasan Simpang Lima Pati tidak mampu mendukung kebutuhan ruang aktivitas seluruh PKL sehingga perlu dilakukan pemindahan sebagian PKL di lokasi lainnya.
6. Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penataan PKL Simpang Lima Pati, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum adanya perda tentang pengaturan PKL dan belum adanya pendekatan yang cukup inovatif dan intens untuk mengatur PKL sehingga aktivitas PKL Simpang Lima Pati masih belum tertata dengan baik. Untuk mewujudkan keadaan yang ideal dalam pemanfaatan ruang terbuka di kawasan Simpang Lima Pati sebagai tempat aktivitas publik diperlukan penataan aktivitas PKL yang meliputi penataan fisik dan kebijakan. Dalam penataan fisik PKL selain dilakukan stabilisasi/pengaturan PKL di kawasan Simpang Lima Pati karena keterbatasan ruang aktivitas PKL, juga dilakukan relokasi sebagian PKL yang tidak tertampung di kawasan Simpang Lima Pati ke Jalan Penjawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ridlo, Mohammad. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Car, Stephen. 1992. *Public Space*. Australia : Cambridge University Press.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan Edy. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Salmina W. 2004. "Studi Kasus : Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota di Medan". *Jurnal Teknik SIMETRIKA*. Vol. 3, No. 3, Hal. 203-210, Desember 2004.

- Kadir, Ishak. 2010. Urapati Kota Kendari. "Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Eks Pasar Lewata. Studi Kasus : Jl. Taman Surapati Kota Kendari". *Jurnal Metropilar*. Vol. 8, No. 1, Hal. 108-116, Januari 2010.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung.
- Widjajanti, Retno. 2009. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota". *Jurnal Teknik*. Vol. 30, No. 3, Hal.162-171, 2009.
- Zakik. 2006. "Analisa Strategi dan Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya". *Media Trend*. Vol. 1, No. 2, Hal. 92-119, Juni 2006.